

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas dua permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam rumusan masalah "Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Keterlibatan WNI Yang Berafiliasi Dengan Organisasi Terorisme Global," dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap WNI yang terlibat dalam organisasi terorisme global merupakan tantangan yang kompleks. Adanya keterlibatan WNI dalam organisasi terorisme global menuntut respons yang efektif dari lembaga penegak hukum untuk melindungi keamanan dan kestabilan negara serta mencegah penyebaran ancaman terorisme. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti kerjasama internasional, pengumpulan bukti *digital*, perlindungan privasi, dan pemahaman yang mendalam tentang ancaman terorisme global. Dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama yang kuat antara lembaga penegak hukum, intelijen, dan pihak terkait lainnya, penegakan hukum terhadap keterlibatan WNI dalam organisasi terorisme global dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
2. Penegakan hukum terkait dengan organisasi terorisme global menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Kompleksitas jaringan teroris menjadi tantangan dalam mengidentifikasi anggota dan mengumpulkan bukti yang cukup. Penggunaan teknologi *digital* dan komunikasi rahasia oleh organisasi teroris membuat pemantauan dan

David Roger Julius Pakpahan, 2024

***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA 18
YANG BERAFILIASI DENGAN ORGANISASI TERORISME GLOBAL***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pengumpulan bukti menjadi sulit. Batasan yurisdiksi dan hambatan dalam kerjasama internasional menghambat pertukaran informasi dan ekstradisi pelaku terorisme. Selain itu, perlu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan privasi serta hak asasi manusia. Organisasi teroris terus mengembangkan taktik dan strategi baru, memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kerjasama antarlembaga, peningkatan kapasitas teknis, pertukaran informasi yang efektif, dan kerja sama internasional yang kuat menjadi faktor kunci dalam upaya penegakan hukum terhadap organisasi terorisme global.

B. Saran

Saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Melakukan studi komparatif dengan negara lain yang menghadapi masalah serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penegakan hukum.
2. Menganalisis kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara lain dalam penanggulangan terorisme. Yang mana, terorisme terorisme telah dikategorikan sebagai kejahatan internasional.
3. Memperhatikan perlindungan privasi dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum.
4. Meneliti peran teknologi dan intelijen dalam mengumpulkan bukti dan melacak anggota organisasi terorisme global.
5. Menyelidiki upaya rehabilitasi dan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait.
6. Mempelajari peran masyarakat sipil dalam mencegah keterlibatan WNI dalam terorisme dan mendukung penegakan hukum.

David Roger Julius Pakpahan, 2024

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA 19 YANG BERAFILIASI DENGAN ORGANISASI TERORISME GLOBAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

7. Mengusulkan kebijakan dan strategi yang konkret untuk meningkatkan penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas, kerjasama internasional yang diperkuat, pendekatan rehabilitasi yang holistik, dan upaya pencegahan yang lebih luas.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam penelitian dan kontribusi terhadap pengembangan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap keterlibatan WNI dalam organisasi terorisme global.